

TRADE OFF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BUMN DAN PENGEMBANGAN UMKM DI PROVINSI RIAU (Studi Kasus PT.Jasa Raharja Cabang Provinsi Riau)

Sri Indarti

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertentangan antara dua hal yang berkepentingan antara kewajiban BUMN menyisihkan sebahagian keuntungannya (1-3%) untuk program Corporate Social responsibility (tanggung jawab social) berupa penyaluran dana yang disebut dengan PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan) kepada pengusaha-pengusaha kecil sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab BUMN terhadap masyarakat, namun di sisi lain masih banyak kendala dari pengusaha-pengusaha kecil tersebut dalam pengembalian dana tersebut yang mengakibatkan penunggakan dalam pengembalian, sehingga dana tersebut tidak bergulir sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian ini dilakukan pada PT.Jasa Raharja (Persero) cabang Provinsi Riau sebagai salah satu BUMN yang menjalankan PKBL dengan asumsi pola yang sama disemua BUMN yang ada di Provinsi Riau berdasarkan penelitian sebelumnya, dengan menggunakan data sekunder, dan analisis data secara deskriptif.

Hasil temuan menunjukkan bahwa selama 21 (dua puluh satu) tahun sejak 1992-2012 program PKBL dijalankan PT.Jasa Raharja (Persero) ditemukan tunggakan sebesar 53,47% yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain: perilaku mitra binaan yang menggunakan dana bukan untuk usaha; mitra binaan dengan tempat usaha yang tidak tetap; pembinaan dan penagihan tidak secara rutin; informasi yang kurang tentang ketentuan-ketentuan terhadap pengembalian; serta mitra binaan tidak mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha. Dari temuan tersebut terlihat adanya kesenjangan antara pengorbanan yang dilakukan BUMN dengan sasaran yang diharapkan dari pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan entrepreneurship yang belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal, perlu pembenahan terhadap sasaran dan manajemen dari program PKBL mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi pelaksanaannya yang melibatkan semua pihak (Pemerintah, BUMN, dan UMKM).

Keyword : *Corporate Social responsibility, Pemerintah, BUMN, dan UMKM*

1. PENDAHULUAN

Munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilatar belakangi oleh eksploitasi sumber daya alam dan rusaknya lingkungan karena operasi perusahaan atau industri yang berlomba-lomba mencari laba sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan dampak social yang dapat terjadi sehingga terjadi krisis lingkungan. Tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam menguasai industri menjadi parameter kualitas kehidupan manusia. Masalahnya bagaimana mengelola perbedaan di antara dua kepentingan yaitu kepentingan industri dan kepentingan lingkungan. Gema CSR semakin terasa pada awal tahun 1960-an saat di mana masyarakat secara global mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan setelah berakhirnya perang dunia II (Wibisono, 2007).

Wacana tentang CSR sangat mendapat perhatian dari berbagai kalangan di penghujung akhir abad ke 20. Tonggak sejarah ini terjadi pada konferensi Tingkat Tinggi (Earth Summit) di Rio Janeiro, Brazillia pada tahun 1992 yang menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable growth*). Derivasi dari kesepakatan ini, mulai memunculkan kesadaran bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* yaitu *corporate value* yang tidak hanya direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *tripple bottom line* yang konsepnya dikembangkan oleh Elkington (Rachman, et al, 2011), yaitu memperhatikan “3P” yaitu perusahaan selain mengejar profit, juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*), dengan kata lain ada tiga tujuan yang sama penting untuk dicapai oleh perusahaan yaitu *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice*. (Susanto,2007).

Pergeseran paradigma dunia usaha yang cukup pesat di mana perusahaan tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi harus pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi social, hal ini semakin memperlihatkan kuatnya pandangan tentang CSR. Terlihat dari regulasi yang ditetapkan oleh bank-bank Eropa yang hanya memberikan pinjaman kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik. *Millenium Pool on CSR* mengungkapkan bahwa terkait dengan CSR seperti : praktek perusahaan bahwa 65% dari 25 ribu responden di 23 negara mempertimbangkan factor-faktor terkait dengan CSR seperti : praktek perusahaan terhadap karyawan, etika bisnis, sikap tanggap terhadap lingkungan dalam menilai perusahaan (Hasibuan-Sedyono, 2005). Sejumlah bursa saham dunia seperti Newyork, London, Hongkong, Singapore telah memasukkan indeks CSR yang mengindikasikan sensitivitas informasi ini ke dalam keputusan investasi saham. Konsekwensi dari adanya indeks-indeks tersebut memacu investor global untuk menanamkan investasinya pada perusahaan-perusahaan yang masuk pada daftar indeks tersebut.

Tidak ada program CSR yang *well implemented* di setiap perusahaan (Wibisono, 2007), namun ada beberapa contoh ruang lingkup program CSR yang disarikan oleh beberapa perusahaan terkemuka seperti: 1). Bidang social antara lain: pendidikan/pelatihan, kesehatan, kesejahteraan social, kepemudaan/kewanitaan, keagamaan, kebudayaan, penguatan kelembagaan, dan lain-lain; 2). Bidang ekonomi antara lain: kewirausahaan, pembinaan UKM, agribisnis, pembukaan lapangan kerja, sarana dan prasarana ekonomi, usaha produktif lainnya; 3). Bidang Lingkungan antara lain : penggunaan energi secara efisien, proses produksi yang ramah lingkungan, pengendalian polusi, penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengembangan ekowisata, penyehatan lingkungan, perumahan dan pemukiman.

Riset yang dilakukan Roper Search Worldwide menunjukkan 75 % responden memberikan nilai lebih kepada produk dan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan yang mempunyai kontribusi nyata kepada komunitas melalui program pengembangan. Sekitar 66 % responden juga menunjukkan mereka siap berganti merek kepada merek perusahaan yang memiliki citra social yang positif. Hal ini membuktikan terjadinya perluasan minat konsumen dari produk ke korporat (Wibisono, 2007). Sejalan dengan hal di atas Asia Forum On CSR Conference pada bulan September 2005 menegaskan bahwa penerapan konsep tanggung jawab perusahaan yang sedang menjadi tren di negara maju dan negara berkembang terbukti bukan sekedar kegiatan perusahaan yang memperbesar pengeluaran, tetapi justru meningkatkan pendapatan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan abad millennium, salah satu di antara pengurangan angka kemiskinan menjadi setengah pada tahun 2015, dari 1,3 miliar jiwa sekarang ini.

Meskipun jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 2000-an, namun bila dilihat dari jumlah totalnya saat ini masih terasa sangat minim, karena masih ada pengusaha yang mempunyai pemahaman bahwa CSR adalah beban yang harus ditanggung perusahaan kepada lingkungan sekitar, yang meningkatkan biaya sehingga pebisnis membuat alasan untuk menaikkan harga jual, dan menurut mereka akan menurunkan daya saing produk, hal ini mengakibatkan keengganan perusahaan memasukkan kalkulasi biaya social dalam struktur biaya produksi.

Di Indonesia, tampaknya pertimbangan profit perusahaan juga masih dominan mengalahkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Chambers dkk (dalam Wibisono, 2007), di antara tujuh Negara (India, Korsel, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia), yang diteliti dengan sampel 50 perusahaan yang berada pada peringkat atas berdasarkan pendapatan operasional pada tahun 2002, menunjukkan Indonesia tercatat sebagai negara yang paling rendah penetrasi pelaksanaan CSR dan derajat keterlibatan komunitasnya dibandingkan enam negara lainnya. Dimasukkannya CSR sebagai kewajiban perseroan dalam undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), telah menimbulkan pro-dan kontra antara pengusaha dan pemerintah

Hasil survey yang dilakukan Frontier Consulting Group terhadap 37 industri dan 200 perusahaan besar di Indonesia, menunjukkan dari empat dimensi citra perusahaan yang diukur, meliputi: *dimensi performance, quality, responsibility*, maka dimensi *responsibility* menunjukkan penurunan, artinya perusahaan masih kurang dalam memperlihatkan tanggung jawab social (CSR) dan kepedulian terhadap lingkungan (Irawan, 2008). Pada tahun 2005 baru ada 27 perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas CSR yang dilaksanakannya (Prayoga, 2007). Dengan kata lain sebahagian besar perusahaan saat ini melihat praktek CSR hanya sebagai kegiatan philanthropy perusahaan, yang menyerap biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dan memberatkan, tanpa berusaha menyadari pentingnya tumbuh bersama dengan komunitas stakeholdernya (Direktur Eksekutif Asian Forum On Corporate Social responsibility dalam Handayani, 2007).

Kajian ini dilakukan di perusahaan BUMN, karena BUMN diwajibkan menyisihkan 1-3 % dari keuntungan untuk melaksanakan CSR, di samping itu praktek tanggung jawab sosial oleh BUMN sungguh menarik untuk dikaji, karena disebabkan adanya faktor pembeda dibandingkan dengan perusahaan non BUMN, yaitu terdapatnya instrumen pemaksa berupa kebijakan pemerintah, bersifat imperative, implementasi CSR merupakan hal yang mandatory bagi BUMN. Bahkan sangat dimungkinkan potensi pemberian donasi social perusahaan BUMN lebih besar dibandingkan perusahaan swasta. Peran sosial BUMN antara lain dituangkan melalui keputusan menteri BUMN Nomor : kep-236/ MBU/2003. Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara BUMN ini pada prinsipnya menyelenggarakan program kemitraan dan program Bina Lingkungan (PKBL).

Kewajiban BUMN yang tertuang pada UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mau atau tidak mau, BUMN harus menjalankannya salah satu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau yang dikenal dengan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Salah satu BUMN yang menjalankan program tersebut adalah PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Provinsi Riau. Penelitian ini hanya mengambil PT.Jasa Raharja (Persero) sebagai gambaran BUMN yang menjalankan PKBL, karena pola penyaluran PKBL di BUMN adalah sama. Berikut dana yang dikucurkan untuk Program Bina Lingkungan dan Kemitraan di PT. Jasa Raharja (Persero) baik dari sisi unit maupun persektor seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1 : Penyaluran Dana Program Kemitraan PT. JASA RAHARJA (Persero) Kantor Cabang Riau dari Tahun 1992 S/D Desember 2011

TAHUN	UNIT (MB)	JUMLAH (Rp)
<2006	436	Rp 6,702,155,000
2007	49	Rp 535,000,000
2008	39	Rp 500,000,000
2009	44	Rp 950,000,000
2010	43	Rp 900,000,000
2011	37	Rp 800,000,000
2012 S/D Maret	7	Rp 150,000,000
JUMLAH	655	Rp 10,537,155,000.00

Sumber : PT.Jasa Raharja (Persero), 2012

Banyaknya dana dan jumlah UMKM yang terlibat setiap tahunnya mestinya memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat, karena bantuan ini sifatnya bergulir, jika tidak terjadi tunggakan, atau tunggakan dapat diminimalisasi, akan memberikan dampak multiplier bagi pengembangan UMKM di Provinsi Riau. Penyaluran dana BUMN tersebut tersebar di berbagai sector perekonomian masyarakat, seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 2 : Penyaluran Dana Program Kemitraan Per Sektor Januari S/D Desember 2011 PT. JASA RAHARJA (Persero) Kantor Cabang Riau

TAHUN	UNIT (MB)	JUMLAH (Rp)
PINJAMAN		
Industri	1	15,000,000.00
Perdagangan	17	368,000,000.00
Pertanian	0	0
Peternakan	0	0
Perkebunan	0	0
Perikanan	0	0
Jasa	19	417,000,000.00
Lain-lain	0	0
SUB JUMLAH	37	800,000,000.00
HIBAH		
Pameran	1	19,469,000.00
Diklat	30	74,000,000.00
SUB JUMLAH	31	93,469,000.00
JUMLAH	68	893,469,000.00

Sumber : PT. Jasa Raharja (persero), 2012

Berdasarkan table di atas, sektor yang banyak menyerap dana PKBL adalah sector perdagangan dan jasa, hal ini disebabkan Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru dengan basis dan sector unggulan perdagangan dan Jasa (Bank Kepri,2007). Dana yang cukup besar tersebut perlu dilakukan evaluasi sejauh mana pemanfaatannya bagi UMKM tersebut, apakah dana tersebut membuat usaha UMKM meningkat atau tumbuh?, apa kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran dana tersebut?. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, sehingga pola Program Bina Lingkungan dan Kemitraan ini benar-benar bermanfaat untuk UMKM atau sebagai salah satu usaha meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab social BUMN terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Riau sebagai tempat BUMN beroperasi.

4. HASIL/PEMBAHASAN

Program CSR di BUMN pada umumnya ditentukan oleh pusat, BUMN di provinsi Riau hanya menjalankan, namun keputusan teknis dan penentuan obyek diserahkan kepada masing-masing cabang, di mana aktivitas CSR tersebut meliputi bantuan beasiswa, PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan), dan bantuan-bantuan yang sifatnya insidental, belum terlihat program CSR yang terintegrasi dan terpadu, ini salah satu penyebab masih kecilnya kontribusi CSR terhadap kinerja perusahaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

PKBL yang dijalankan oleh BUMN dan BUMD itu sendiri dikritisi oleh beberapa ahli, Suratmo (2008), Kemitraan mirip dengan sebuah aktivitas social dari sisi perusahaan, namun masih ada bau bisnisnya, karena masing-masing pihak harus memperoleh keuntungan. Timbul pertanyaan: apakah kerjasama antara pengusaha besar (BUMN) dan pengusaha kecil yang menguntungkan secara ekonomi kedua belah pihak, dan apalagi hanya menguntungkan pihak pengusaha kuat bisa dikategorikan CSR?.

Kecenderungan yang terjadi dari hasil wawancara peneliti bahwa CSR di BUMN Provinsi Riau tidak diimplementasikan secara serius, tidak terprogram dengan baik, dan tidak merupakan kebutuhan perusahaan, sehingga terkesan hanya untuk memenuhi kewajiban yang diatur pemerintah dalam UU No.40/2007. tentang perseroan terbatas. Sifatnya sporadis, accidental, dan tidak tersosialisasi dan hanya melibatkan orang-orang tertentu saja.

Praktek CSR di BUMN memang belum optimal berdasarkan hasil tinjauan dan wawancara peneliti, walaupun posisi BUMN memiliki dua sisi mata uang, di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan disisi lainnya berperan sebagai institusi social. Kelemahan tersebut antara lain : 1). pembatasan terhadap objek bantuan; 2). PKBL mengharuskan penyaluran bantuan langsung dari BUMN tanpa adanya pihak ketiga sebagai pendamping, sehingga jarang terjadi penguatan kapasitas kelembagaan bagi lembaga yang mestinya jadi mitra; 3). Sebagian besar bantuan social BUMN kepada masyarakat masih bersifat karikatif, sekedar bagi-bagi sumbangan jangka pendek, belum mengarah pada keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Bahkan program kemitraan yang dirancang untuk pemberdayaan umumnya juga masih sekedar memberikan modal financial tanpa dibarengi dengan peningkatan bagi para beneficiaries-nya;4). Ketidakjelasan mekanisme hubungan antara unit-unit penyelenggara kegiatan CSR, bahkan tanpa koordinasi dan integrative.;5). Pengelolaan program social di BUMN adalah terlalu birokratis; 6). Belum adanya blue print yang dimiliki oleh mayoritas BUMN terkait dengan penyelenggaraan bantuan social, hal ini disebabkan oleh salah satunya untuk PKBL karena sifat program imperative berasal dari Kementrian BUMN dan perusahaan merasa sebagai pelaksana kegiatan semata.

Berdasarkan beberapa kelemahan di atas menyebabkan implementasi CSR belum optimal di BUMN, oleh sebab itu hal ini menjadi peluang untuk melakukan perbaikan dan pembenahan di dalam kementerian BUMN tersebut, baik dalam hal kebijakan, program, maupun mekanisme pelaksanaan CSR tersebut, sehingga CSR benar-benar bermanfaat bagi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, demikian pula bagi internal stakeholders CSR dapat membawa manfaat dalam kontinuitas profit bagi shareholder dan kebanggaan bagi karyawan, dan bagi eksternal stakeholder, masyarakat merasakan dampak untuk kehidupan social ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, dan bagi pemerintah untuk menambah pendapatan Negara atau daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penyaluran dana PKBL pada PT. Jasa Raharja (Persero) ditemukan masih besarnya tunggakan yang dilakukan oleh UMKM dari dana yang digulirkan seperti ada table berikut:

Tabel 3 : Posisi Tunggakan Mitra Binaan sampai dengan Bulan Juni 2012 Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Provinsi Riau

Tahun Penyaluran dana	Cicilan seharusnya s.d. Juni 2012	Cicilan yang diterima s.d. Juni 2012	Tunggakan s.d. Juni 2012
Penyaluran tahun 00-10	9.057.664.939	8.498.500.227	559.164.712
Total	10.280.804.939	9.772.036.892	558.768.047

Sumber : PT.Jasa Raharja (Persero), 2012.

Data di atas menunjukkan terjadi penunggakan yang cukup besar, hal ini menunjukkan ada banyak persoalan/kendala yang dialami baik oleh BUMN sebagai penyalur dana, maupun entrepreneur (masyarakat) sebagai pengguna dana, sehingga ini memerlukan pemikiran bersama agar penyaluran dana PKBL ini sesuai dengan misinya sebagai salah satu bentuk kepedulian BUMN dalam membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar perusahaan. Periode sebelumnya yaitu dari tahun 1992-1999 terjadi tunggakan yang juga sangat besar yaitu sebesar 53,47% seperti ditunjukkan pada table berikut :

Table 4 : Pinjaman Bermasalah Periode 1992-1999 Pada PT.Jasa Raharja (persero)

Sumber dana	Cicilan seharusnya s.d. Juni 2012	Cicilan yang diterima s.d. Juni 2012	Tunggakan s.d. Juni 2012
PT.Jasa Raharja	528.912.500	245.682.566	282.833.269

Sumber : PT.Jasa Raharja (Persero), 2012.

Hasil temuan diatas menunjukkan bahwa selama 21 (dua puluh satu) tahun sejak 1992-2012 program PKBL dijalankan oleh PT.Jasa Raharja (Persero) ditemukan tunggakan yang cukup besar. Rekapitulasi permasalahan di atas disebabkan oleh beberapa hal antara lain: perilaku mitra binaan yang menggunakan dana bukan untuk usaha; mitra binaan dengan tempat usaha yang tidak tetap; pembinaan dan penagihan tidak secara rutin; informasi yang kurang tentang ketentuan-ketentuan terhadap pengembalian; serta mitra binaan tidak mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha. Dari temuan tersebut terlihat adanya kesenjangan antara pengorbanan yang dilakukan BUMN dengan sasaran yang diharapkan dari pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan entrepreneurship yang belum sepenuhnya bisa berjalan dengan optimal, untuk itu perlu pembenahan terhadap sasaran dan manajemen dari program PKBL mulai dari perencanaan, proses, hingga evaluasi dari program tersebut.

5. KESIMPULAN/SARAN

A. Kesimpulan

1. Sasaran dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan oleh BUMN belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terjadi kesenjangan antara pengorbanan berupa dana yang digulirkan dengan misi PKBL dalam rangka mengurangi kemiskinan atau meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab social BUMN terhadap masyarakat atau dalam rangka menjalankan fungsinya CSR sebagai *discretionary responsibility*. Di sisi lain terjadi penunggakan yang cukup besar, sehingga dana yang disalurkan tidak bergulir sebagaimana yang diharapkan dalam rangka menumbuhkembangkan UMKM
2. Belum terbinanya dengan baik semangat atau jiwa kewirausahaan dikalangan pengusaha UMKM yang terlihat dari sikap dan perilaku dalam menggunakan pinjaman dengan kata lain masih banyak pengusaha tersebut yang menggunakan dana yang diperoleh tidak diperuntukkan untuk mengembangkan usahanya, motivasi yang kurang, takut mengambil resiko, dan lain sebagainya yang harusnya sikap seperti itu tidak dimiliki oleh seorang entrepreneur.

B. Saran

1. Perlu keterlibatan stakeholder meliputi : pemerintah, BUMN, dan Masyarakat dalam merencanakan, implementasi, dan evaluasi CSR yang akan dijalankan .
2. Perlu keterlibatan infrastruktur kelembagaan yang mendukung implementasi dari berbagai aturan yang ada tentang kewajiban CSR yang dijalankan seperti : sejauhmana keterlibatan institusi pemerintah dalam perencanaan CSR, institusi apa yang berhak melakukan monitoring atau pengawasan atas pelaksanaan CSR, bentuk evaluasi serta seperti apa dan siapa yang akan memberikan sanksinya.
3. Perlu pembinaan bagi lembaga usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya meliputi : pembinaan teknis maupun non teknis (manajerial), untuk itu perlu ada lembaga pendamping antara pemberi dan peminjam dana atau antara BUMN dengan pengusaha UMKM yang secara intensif melakukan sosialisasi, memonitor dan membina UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Alyson Warhurst (2008), *Corporate Social Responsibility and The Mining Industry*, Mining And Environment Research Network
- Branto Castelo Manuel & Rodrigues Lima Lucia, 2006, *Corporate Social Responsibility and Resource- Based Perspectives*, *Journal Of Business Ethics* 69: 111-132 DOI 10.1007/s 10551-006-9071-z
- Budimanta, Adi Prasetyo, Bambang Rudito, 2008, *Corporate Social Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, ICSD, Jakarta
- Carrol, A.B. Three dimensional conceptual model of corporate social performance dalam Henriques and P.Sadorsky. The relationship between environmental commitment and managerial perception of stakeholder importance, *Academy of Management Journal*, Review 4 (4) 497-505
- Chand,Masud, 2006, The Relationship between Corporate Social Performance and Corporate Financial performance ; Industry Type as Boundary Condition, *The Business Review*, Cambridge, September,5,1
- Darwis ,2007, *Refleksi Paradigma Holistik Untuk Merekonstruksi Konsep Kinerja Dalam Akuntansi Dan CSR(Studi pada PT. Inco dan Komunitas Sorowako)*, disertasi Program Studi Ilmu Akuntansi FE Universitas Brawijaya, Malang
- Hurst E.Nathan, 2004, *Corporate Ethics, Governance and Social Responsibility : Comparing European Business Practices to those in The United States*, A Study Conducted For the Business and Organizational Ethics Partnership Markkula Center For Applied Ethics Santa Clara University. Spring 2004.
- Jiyang Bae and Glen Cameron, Conditioning effect of prior reputation on perception of corporate giving, *Public relation review*, 2006.
- Joedo, Malang,Hari.S, 2006, *Reinventing BUMD Kunci Sukses Mengembangkan BUMD Produktif dan Profesional*, PT. Gramedia, Jakarta
- Kanji Tanimoto & Kenji Suzuki (2007), *Corporate Social Responsibility In Japan: Analyzing The Participations Companies In Global Reporting Initiative* , (2005:7)
- Kemp,Melody, 2001, *Corporate Social Responsibility In Indonesia Quixotic Dream or Confident Expectation*, , United Nation Research Institute For Social Development, Technology, Business and Society programme *paper Number 6*, December 2001
- Kleinrichert Denise, 2007, *Ethics, Power and Communities : Corporate Social Responsibility Revisited*, *Journal Of Business Ethic* (2008) 78: 475-485 DOI 10.1007/s 10551-006-9339-3
- Lako, Andreas, 2008, *Kewajiban CSR dan reformasi Paradigma Bisnis Dan Akuntansi, Usahawan Manajemen Indonesia*, No. 06 Th XXXVII 2008, Jakarta

- Prasetyo, Catur, 2008, *Kekuatan Komuniti Dalam Corporate Social Responsibility*, Usahawan Manajemen Indonesia, No. 06 Th XXXVII 2008, Jakarta.
- PT.Jasa Raharja, 2012, Laporan PKBL Cabang Riau, Juni 2012
- Rachman Nurdizal M, Asep Efendi, Emir Wicaksana (2011), *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Penebar Swadaya, Jakarta,2011.
- Rahardja ,2007, *Keterkaitan Tanggung Jawab Sosial, Kinerja Sosial Dan Kinerja Finansial Perusahaan Dalam Perspektif Teori Stakeholder (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Jawa Tengah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Brawijaya, Malang.
- Robin P Donald & Eric Reindenbach, 1987, *Social Responsibility, Ethics, and Marketing Strategy : Closing The gap between Concept and Application*, *Journal of Marketing*, Jan, 1987; 51,1; ABI/INFORM Research
- Rumapea, 2006, *Hubungan Tanggung Jawab Sosial dengan Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Persero Pura I Bandar Udara Sam Ratulangi Manado*, Jurnal Aplikasi Manajemen , Jurusan Manajemen FE Universitas Brawijaya, Malang.
- Susanto,2007, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility* , JCG, Jakarta
- Tunggal Widjaya Amin, 2008, *Business Ethics dan Corporate Social Responsibility (CSR), Konsep dan Kasus*, Harvarindo, Jakarta
- Udiyaningsih, 2006, *Etika Bisnis dan Perilaku Etis Manajer Kaitannya dengan Tanggung Jawab Perusahaan pada Lingkungan Sosial*, Jurnal Aplikasi Manajemen, volume 4, No.1, April 2006, Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya Malang.
- Untung, Budi Hendrik, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Graha, Jogjakarta
- Wibisono, Yusuf, 2008, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, Ashkapb Media Grafika Surabaya, Surabaya
- World Bank/International Finance Corporation (2006), *A Corporate Social Responsibility (CSR) Diagnosis Module for Application in Value Chain Analysis (VCA)*